

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- , *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Alexander Seran, *Moral Politik Hukum*, Obor, Jakarta, 1990.
- Alfian Lains, *Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru*, Prisma, Jakarta, 1985.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- , *Korupsi di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- , *Perbandingan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- , *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ed. I Yasrit Watampone, Jakarta, 2005.
- Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Arifin Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Praktik dan Kritik*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005.
- A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik Di Negara Modern*, Cetakan Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana: Asas-asas Pokok, Pengertian dan Teori*, Transito, Bandung, 1984.
- A Von Hirsch, *Censure and Sanctions*, Oxford University Press, Oxford, 1993.
- Badan Pemeriksa Keuangan, *Prosedur Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah*, Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, 2018.
- Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, cet. 2, Buku Kompas Jakarta, 2002.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994.
- , *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- , *Pidato Pengukuhan Guru Besar UNDIP-Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2007.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- , *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpretama, Semarang, 2011.
- Bhenyamin Hoessein, *Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Konteks Pemerintahan Umum dalam Buku Pemerintahan Daerah di Indonesia*, MIPI, Jakarta, 2009.
- , *Perubahan Model, Pola, dan bentuk Pemerintaha Daerah Dari Era Orde baru ke Era Reformasi*, DIA FISIP UI, Jakarta, 2011.
- Bohari, *Hukum Anggaran Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.
- Cassia C. Spohn, *How do Judge Decide:The Search for Fairness and Justice in Punishment*, Sage Publication, Washington, 2008.
- Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2014.
- C.M.V. Clarkson, *Understanding Criminal Law, Second Edition*, Sweet & Maxwell Ltd, London, 1998.
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.

- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- D Garland and RA Duff, Preface: A. von Hirsch, *Censure and Proportionality*, in RA Duff and D Garland (eds), *A Reader on Punishment*, Oxford University Press, Oxford, 1994.
- Dhaniswara K. Harjono, *Monograf Kedudukan Hukum Perusahaan Induk (Holding Company)*, Jakarta: UKI Press, 2021.
- , *Bahan Ajar Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: UKI Press, 2021.
- Dian Puji N. Simatupang, *Paradoks Rasionalitas; Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta, 2011.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (edisi revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- E. Suherman, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1979.
- Eti Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publicising, Jakarta, 2010.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana 1: Suatu Pembahasan Pelajaran Umum*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Manado, 2012.
- Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Galia Indonesia, Bogor, 2007.
- G.A van Hamel, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*, Bohn-Harlem, 1927.
- G Jakobs, *Strafrecht Allgemeiner Teil: die Grundlagen und die Zurechnungslehre, 2nd edn*, De Gruyter, Berlin and New York, 1993.

- Glanville Williams, *Criminal Law (The General Part-Second Edition)*, Stevens & Sons Limited, London, 1961.
- Gunarto Suhardi, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2002.
- Gustav Radbruch dalam Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- GWF Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, 6th edn, Suhrkamp, Frankfurt, 2000.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Herbert L Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Oxford University Press, 1968.
- Hermin Hadiati, *Asas-asas Hukum Pidana, Ujung Pandang*: Lembaga Percetakan dan Penerbitan, Universitas Muslim Indonesia, 1995.
- Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thefa Media, Yogyakarta, 2014.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Hj. Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012.
- H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014.
- Ibnu Syamsi, *Dasar-dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- , *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2006.
- IS Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- J Austin, *How to do Things with Words*, Clarendon Press, Oxford, 1962.

- J.E Sahetapy, *Suatu Studi khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Bhuana Ilmu Populer*, Jakarta, 2008.
- John M. Scheb, *Criminal Law (Sixth Edition)*, Wadsworth Cengage Learning, New York, 2012.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008
- J Searle, *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*, Cambridge University Press, Cambridge, 1969.
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka refleksi, Makassar, 2010.
- Kevin D. Zega, *Titik Singgung Tindak Pidana Korupsi dengan Hukum Administrasi Negara*, MaPPI FH UI, Depok, 2020.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1969.
- , *Total Justice*, Sage Foundation, Russel, 1994.
- , *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki*, Tatanusa, Jakarta, 2001.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya)*, Alumni, Bandung, 2007.
- , *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008.
- Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum*, Diktat, Bandung, 2007.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- , Deni Setya, Bagus Yuherawan, *Delil-Delik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.

- Mardiasmo, *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik*, 2003.
- Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- , *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- , *Asas-asas Hukum Pidana cet VI*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 2008.
- Moh. Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Mohtar Mas'ood, *Perbandingan Sistem Politik, Cetakan Ke-16*, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 2016.
- Muchamad Taufiq, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, MNC Publishing, Malang, 2017.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- , *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, Alumni, Bandung, 1992.
- , *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.
- , dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- , *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- , *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Muladi dan Dwidja Prijatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, STHB, Bandung, 1991.

- M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Nandang Alamsah Dkk, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Unpad Press Bandung, 2019.
- Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Cet. Kedua, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009.
- Nurliah A. Wahyudin, *Hubungan Antar Pemerintah Dalam Meningkatkan Investasi Daerah dalam buku Pemerintahan Daerah di Indonesia*, MIPI, Jakarta, 2009.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- , *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Surabaya, 1997
- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Panjaitan, Petrus Irwan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Indhill Co, Jakarta, 2007.
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Philipus M. Hadjon, et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet. VIII, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- Purnomo, Bambang, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung 2007.
- Remington dan Ohlim, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- , *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013.
- Roeslan Saleh, *Pikiran – Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yayasan LBH, Jakarta, 1989.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.

- , *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, 1996.
- , *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung, Mandar Maju, 2004.
- , *Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003: Melawan Kejahatan Korporasi*, Paper, Jakarta, 2006.
- , *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- , *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2009.
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Routledge, *Criminal Law, Routledge Taylor & Francis Group*, London and Newyork, 2011.
- R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1990.
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Safri Nugraha, et.al, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005.
- Sahat HMT Sinaga, *Notaris & Badan Hukum Indonesia*, Jakarta, Oktober 2019.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- , *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006.
- , *Penegakan Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2010.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1955.
- SF Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.
- , dkk, Mochtar Kusumaatmadja, *Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, Jakarta, Epistema Institute, 2012.
- Soedarto, *Kapita Selekt Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio-Kriminologi (Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan)*, Sinar baru, Bandung, 1984.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Armico Bandung, 1990.
- S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986.
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1 A, Badan Penyediaan Kuliah Fakultas Hukum Undip*, Semarang, 1973.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1977.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- , *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Suhendar, *Konsep Kerugian Keuangan Negara*, Malang, Setara Press, 2015.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung Alumni, Surakarta, 1994.
- S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Penerbit PT Ichtisar Baru, Jakarta, 1991.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Ctk. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Theodarus M Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- T. Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum, ed. *Peranan Hukum dalam Perekonomian Di Negara Berkembang*, Yayasan LBHI, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa : Keterpaduan atau Pergulatan*, Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, Depok, 2000.

W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1995.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1981.

-----, *Asas–Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

-----, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Kontruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.

Yudi Latif, *Negara Paripurna : Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta, 2011.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta, 1986.

Jurnal

Ahmad Feri Tanjung, Rizkan Zulyadi, dan Ronald Hasudungan Sianturi, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Pengadaan Alat Kesehatan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty Of Law, Universitas Islam Indonesia, Vollume 26, Issue 1 Januari 2019

Amrizal J Prang, *“Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi”*, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum 13, No. 1, 2011.

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia, Edisi IV , 2000.

Bima Priya Santosa, et. al, *Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana Tertentu*, The Netherlands-Indonesia National Legal Reform Program (NLRP), Jakarta, 2010.

Fence M. Wantu, *“Antinonim Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol.19 Nomor 3, Yogyakarta : Fakultas Hukum Gadjah Mada, Oktober 2007.

-----, *“Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata”*, Jurnal Dinamika Hukum 12, No. 3, 2012.

Guntur Rambey, *Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda*, Jurnal De Lega Lata, Volume 1 No. 1, 2016.

Hari Chand, *Modern Jurisprudence, International Law Book Service*, Kuala Lumpur, 1994.

Harkristuti Harkrisnowo, *“Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia”*, (orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 8 Maret 2003).

- Ibrahim Ali , et.al, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perkara Korupsi Angelina Patricia Pingkan Sondakh* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.SUS/2013), Jurnal Justiqua, Vol.02 No. 02 2020.
- I Gusti Ketut Ariawan, *Stolen Asset Recovery, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset Negara*, Kertha Patrika, Vol. 33 No. 1, Januari 2008.
- I Made Ardian Prima Putra, “*Pidana Pengawasan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*”, Udayana Law Journal 6, No. 4, 2017.
- Irfan Ardiansyah, “*Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*”, Jurnal Hukum Respublica 17, No. 1 2017.
- Irving R . Kaufman. “*The Essence of Judicial Independence*”. Columbia Law Review 80, No. 4, 2016.
- Iwan Darmawan, Robby Satya Nugraha, *Ideologi Pancasila Suatu Refleksi dan Proyeksi Akar Kebangsaan Indonesia Dalam Perspektif Aliran Filsafat Hukum Sociological Jurisprudence*, Jurnal PALAR (Pakuan Law Review), Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021.
- Jacob Hattu, “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*”, Jurnal Sasi, Vol. 20, No 2, 2014.
- Jouhari, Jurnal Ilmu Hukum Reusam, ISSN 2302-6219, E-ISSN 27225100, *Kebenaran Materiil Dalam Kajian Hukum Pidana*, Volume VIII Nomor 2 (November 2020) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
- Karel Antonius Paeh, “*Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hubungan Dengan Unsur Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, artikel dalam Jurnal Kartalogis, Vol. 5 No. 2, 2017.
- Lawrence M. Friedman, “*On Legal Development*” Dalam : *Rutgers Law Rivies*, Vol. 24. 1969.
- Mailinda Eka Yuniza dan Andrianto Dwi Nugroho, “*Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*”, Jurnal UGM Vol 25, No 2 Yogyakarta, 2013.
- Mardiana, *Pengaruh Pemberian Sanksi Terhadap Kedisiplinan Guru di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Terpadu Pekanbaru*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. UIN SUSKA RIAU, Pekanbaru, 2018.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1994.
- Masyelina Boyoh, “*Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil*”, Lex Crimen 4, No. 4, 2015.

- Mompang L. Panggabean, *Jurnal Ilmiah: Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Kebijakan Legislatif Dalam Hukum Pelaksanaan Pidana di Indonesia*, UNDIP E-JOURNAL SYSTEM, 2012.
- Mompang L. Panggabean, *Handling of Hoax News According to Law Number 1 of 1946*, International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 08, 2020.
- Muntaha, Hanny Amelia, Novi E Baskoro, “*Tinjauan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*”, Jurnal Pemuliaan Hukum, Vol. 4, No. 1, April 2021.
- Paul J. Hoffer, Kevin Blackwell, dan Barry Ruback, “*The Effect of the Federal Sentencing Guidelines on Interjudge Sentencing Disparity*”, Journal of Criminal Law and Criminology 90, 1999.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Jurnal Pro Justisia, Yuridika, No. 5 1997.
- Posner, Richard, “*An Economic Theory of The Criminal Law*”. Columbia Law Review. Vol. 85. No. 6.
- Pramella Yunidar Pasaribu dan Bobby Briando, *Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penyusunan Kode Etik Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13, No. 2, 2019.
- Purwoto Ajeng Arindita Lalitasari, Pujiyono, “*Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Isparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama- Sama Di Pengadilan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang*,” Diponegoro Law Journal 8, No. 3, 2019.
- Ramadhani, G.S, dan Arief P Barda Nawawi, *Sistem Pidana dan Tindakan Double Track System dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Diponegoro Law Journal 1, No. 4 2012.
- Risa, Noerteta, and Setyawan, “*Independensi Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif PERMA No. 1 Tahun 2020 Jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009*”, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol 24 No 1.
- Siti Azizah, “*Analisis Ekonomi Dalam Pembentukan Hukum*”, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 No. 2, 2012.
- Sumarni Alam, “*Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek Di Indonesia*”, Jurnal Hukum Replik, Volume 5 No. 2, September 2017.
- Suradji, Mugiyati, Sutriya, ed., *Pengkajian tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerjasama Internasional dalam Konvensi PBB, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 2008.
- Thomas Olechowski, “*Legal hierarchies in the works of Hans Kelsen and Adolf Julius Merkel*,” in *Series Editors et al.*, Studies in the History of Law and Justice 12

Reconsidering Constitutional Formation II Decisive Constitutional Normativity From Old Liberties to New Precedence Series Editors, n.d

Titin Apriani, *Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Mataram, Vol. 13, No. 1, Maret 2019.

Vidya Prahassacitta, *“Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyuapan Di Sektor Privat Dalam Hukum Nasional Indonesia: Suatu Perbandingan Dengan Singapura, Malaysia Dan Korea Selatan”*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-47 No. 4 Oktober-Desember 2017.

Yohanes Elieser, *Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bulungan*, Jurnal Paradigma 7, No. 2, 2018.

Yunie Herawatie, *Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila*, Prodi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknologi Mineral UPN “Veteran” Yogyakarta, Jurnal Volume 18, Nomor 1, Januari 2014

Zulfi Diane Zaini, *“Perspektif Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat)”*, Jurnal Hukum, Vol. 28, No. 2, Desember 2012.

Peraturan dan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2020, tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, Dan Pemberian Keterangan Ahli.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Internet

“Akankah Kasus Korupsi Melandai di Tahun 2022”,
<https://www.kompas.id/baca/riset/2021/12/27/akankah-kasus-korupsi-melandai-di-tahun-2022>, [diakses tanggal 4 Agustus 2022, pukul 14:20]

Andhika Rakhmanda, “Korupsi Perikanan dan Dampaknya”, edisi 3 Desember 2020,
<https://www.kompas.id/baca/opini/2020/12/03/korupsi-perikanan-dan-dampaknya>, [diakses tanggal 8 Agustus 2022, pukul 11:15]

Buku Saku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
<http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2022/05/BUKU-SAKU-PERMA-1-2020-1.pdf>, diakses tanggal 7 November 2022, Pukul 10.00 WIB

“Deretan Kasus Korupsi Yang Sebabkan Kerugian Negara Terbesar”,
<https://voi.id/bernas/56857/deretan-kasus-korupsi-yang-sebabkan-kerugian-negara-terbesar>, [diakses tanggal 4 Agustus 2022, pukul 15:20]

Helmi Muammar dkk, “Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Widya Pranata Hukum, Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum, Vol.3, No.2, 2021 <https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/412>, Diakses tanggal 6 November 2022, Pukul 18.00 WIB.

HM. Laica Marzuki, “Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Konteks Perkembangan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara RI”, [Http://Ptun-Jakarta.Go.Id](http://Ptun-Jakarta.Go.Id).

<https://berandahukum.com/a/teori-hukum-teori-legal-system-lawrence-m-friedman>, diakses tanggal 5 Juni 2023, Pukul 12.32 WIB

<https://info-hukum.com/2017/03/08/kebijakan-penanggulangan-kejahatan/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023, Pukul 19.00 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/a/siapa-berhak-menetapkan-kerugian-negara-di-kasus-tipikor-ini-penjelasan-hukumnya-lt61bb7b4ad897c/>, diakses tanggal 18 Mei 2023, Pukul 20.00 WIB

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220523-memahami-biaya-sosial-korupsi-yang-merugikan-negara>. Diakses tanggal 22 Januari 2023, Pukul 20.00 WIB.

Kementrian Komunikasi dan Informatika, “*Apresiasi Capaian Pemulihan Aset, Presiden Dorong Pembentukan UU Perampasan Aset Tindak Pidana*” <https://kominfo.go.id/content/detail/38615/apresiasi-capaian-pemulihan-aset-presiden-dorong-pembentukan-uu-perampasan-aset-tindak-pidana/0/berita> [diakses tanggal 4 Agustus 2022, pukul 13:20]

“*Kerugian Negara Kasus PT ASABRI*”, <https://www.bpk.go.id/news/kerugian-negara-kasus-pt-asabri-rp2278-triliun>, [diakses tanggal 4 Agustus 2022, pukul 13:20]

Muhammad, Iqbal, “*Korupsi Benih Lobster: Edhy Prabowo Dituntut 5 Tahun Penjara*”, edisi 29 Juni 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210629185320-4-256888/korupsi-benih-lobster-edhy-prabowo-dituntut-5-tahun-penjara>, [diakses tanggal 7 Agustus 2022, pukul 12:30]

Muhammad Naufal, “*Kronologi Dugaan Korupsi Pembangunan Pasar yang Libatkan Pegawai Disperindag Kota Tangerang*”, diakses melalui : <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/05/10/21304241/kronologi-dugaan-korupsi-pembangunan-pasar-yang-libatkan-pegawai>, diakses pada tanggal 2 Desember 2022, Pukul 21.00 WIB

Nanda Perdana Putra “*Rincian Kerugian Korupsi Duta Palma Rp78 T, Dari Reboisasi hingga Harga Sawit*”, edisi 3 Agustus 2022, <https://www.merdeka.com/peristiwa/rincian-kerugian-korupsi-duta-palma-rp78-t-dari-reboisasi-hingga-harga-sawit.html>, [diakses tanggal 7 Agustus 2022, pukul 14:20]

Novitri Selvia, “*Korupsi Proyek Tebing Sungai Batang Bangko, Dua Tersangka Belum Ditahan*”, edisi 23 Desember 2021, <https://padek.jawapos.com/sumbar/solok-selatan/23/12/2021/korupsi-proyek-tebing-sungai-batang-bangko-dua-tersangka-belum-ditahan/>, [diakses tanggal 8 Agustus 2022, pukul 11:15]

“*Persepsi Korupsi 2020, Korupsi Respon Covid 19 dan Kemunduran Demokrasi*” <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/>, diakses tanggal 4 Agustus 2022, pukul 13:20 WIB

Transparency International adalah organisasi non-pemerintah berskala internasional yang bertekad untuk memerangi ketidakadilan yang disebabkan oleh korupsi. Salah satu publikasi tahunan yang dikeluarkan oleh organisasi ini adalah hasil survey yang dikenal sebagai Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Survey tersebut mengurutkan 180 negara di dunia berdasarkan tingkat persepsi atau anggapan masyarakat mengenai korupsi yang terjadi pada jabatan publik dan politik. Indeks Persepsi Korupsi menggunakan skala 0 (korupsi yang tinggi) hingga 100 (korupsi yang rendah). Oleh karena itu, semakin tinggi nilai persepsi korupsi sebuah negara artinya semakin rendah

pula korupsi yang terjadi di negara tersebut. Diakses dari: <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/politik/infografis/indeks-persepsi-korupsi#>, tanggal 4 Agustus 2022, Pukul 12.00 WIB

Tri Meilani Amaliya, “*KPK: Perampasan aset hasil korupsi 2021 meningkat Rp80 miliar*”, edisi 3 Januari 2022, <https://www.antaranews.com/berita/2620677/kpk-perampasan-aset-hasil-korupsi-2021-meningkat-rp80-miliar>, [diakses tanggal 4 Agustus 2022, pukul 14:20]



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- I. Nama** : Maju Posko Simbolon, S.H., M.H.
Tempat/Tgl Lahir : Sukabumi / 6 Nopember 1979
Alamat Rumah : Green Grass Townhouse, Blok C, No.8, Kel. Kelapa Dua
Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur
Alamat kantor : HPS Lawyers, Gedung Yarnati, Lantai 4, R-410 & 403,
Jalan Proklamasi, No.44, Menteng, Jakarta Pusat
Status Perkawinan : Kawin
Isteri : Christina Susanti, S.H.
Anak : Grace Jennifer Simbolon
Matthew Geonathan Simbolon
Ayah : (Alm) M. Simbolon
Ibu : (Almh) L. Silitonga

II. Pendidikan

- Sekolah Dasar di SD Mardi Yuana Sukabumi, tamat tahun 1992
- Sekolah Menengah Tingkat Pertama di SMP Ign. Slamet Riyadi, Jakarta, tamat tahun 1995
- Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 58, Jakarta, tamat tahun 1998
- Fakultas Hukum (S.1) di Universitas Kristen Indonesia, Jakarta tamat tahun 2002
- Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (S.2) di Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, tamat tahun 2014

III. Pekerjaan

- Law Office Refer Harianja & Partners, sebagai Associates, (2003-2005)
- Law Office Saut Raja & Partners, sebagai Associates, (2005-2007)
- LBH Mawar Saron Jakarta, sebagai Pembela Umum, (2007-2010)
- Kantor Hukum Hotma Sitompel & Associates, sebagai Associates, (2010-2017)
- Kantor Hukum HPS Lawyers, sebagai Pendiri & Partners (2017 – sekarang)

IV. Pengalaman Organisasi

- Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)
- Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI)
- PBH Peradi Jakarta Utara

Karya Ilmiah

- *Assessment Policy and Determination Of State Losses By The Corruption Eradication Commission In Committing Corruption Crime*

